

**KEGIATAN INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN,  
PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH PARTISIPATIF GUNA  
MENDUKUNG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DI KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh :

**PERTIWI LILIYANI**  
**NIT. 15242923**  
**Perpetaan**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN  
2019**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI.....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Kajian Literatur .....	5
B. Kerangka Teoritis.....	8
1. IP4T Partisipatif.....	8
2. Pemetaan Partisipatif.....	13
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	14
C. Kerangka Pemikiran.....	15
D. Pertanyaan Penelitian .....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
A. Format Penelitian .....	18
B. Lokasi atau Obyek Penelitian.....	18
C. Subjek, Informan, dan Teknik Pengambilan Data .....	19
D. Definisi Operasional Konsep atau Variabel .....	19
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	20
F. Analisis Data .....	22
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN .....	23
A. Daerah Penelitian .....	23
1. Desa Banaran.....	24

	Halaman
2. Desa Sumberbening.....	28
3. Desa Sidorejo.....	30
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun .....	34
C. Para Pihak Yang Berkepentingan.....	42
BAB V KEGIATAN IP4T PARTISIPATIF .....	45
A. Kerja Bersama .....	45
B. Tahapan Kegiatan IP4T Partisipatif .....	52
1. Tahapan Perencanaan .....	53
2. Tahapan Persiapan.....	57
3. Tahapan Pelaksanaan.....	58
4. Tahapan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi .....	64
C. Kendala-kendala Kegiatan IP4T Partisipatif.....	65
BAB VI HASIL IP4T PARTISIPATIF UNTUK MENDUKUNG PTSL.....	69
A. Hasil Kegiatan IP4T Partisipatif .....	69
B. Manfaat Kegiatan IP4T Partisipatif Tahun 2018 Guna Mendukung PTSL Tahun 2018 .....	69
C. Manfaat Kegiatan IP4T Partisipatif disamping untuk PTSL .....	76
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) .....	76
2. Desa .....	77
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun .....	78
4. Pemerintah Daerah .....	78
5. Kepolisian Resort Madiun.....	79
6. Komando Distrik Militer 0803/Madiun.....	79
BAB VII PENUTUP .....	80
A. KESIMPULAN .....	80
B. SARAN .....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN .....	82

## **ABSTRACT**

*The inventory of Land Tenure, Ownership, Use, and Utilization (IP4T) which is conducted by the City/Regency Land Office, often constrained by limited human resources and State Budget (APBN). It takes a long time to realize each sub-district/village in the regency/city which conducts the IP4T, if it's waits for the APBN. Meanwhile many activities must be carried out by the Land Office other than IP4T, such as the Complete Systematic Land Registration (PTSL), and other Land Activities. For the solution to solve the limited human resources and APBN, in the IP4T implementation, then it needs to conduct an activity based on the participation of society. An activity based on the participation of society is called the Participatory IP4T, in the context of IP4T. The results of such Participatory IP4T activities can open opportunities to support President Joko Widodo's program through PTSL activities. This research aims to find out the stages of the Participatory IP4T activity which involves parties, as well as to find out the benefits of the Participatory IP4T results for the PTSL activity.*

*This research used the descriptive method with the qualitative approach. The qualitative analysis technique was used to answer the research questions. The first problem analysis was done by composing statements to describe: (1) the involved parties, (2) the fund resources, (3) the stages of Participatory IP4T activity, and then (4) the obstacles of Participatory IP4T activity. The second problem analysis was done by composing statements to find out: (1) the results of Participatory IP4T activity, (2) the benefits obtained by the results of Participatory IP4T to support PTSL activity, and then (3) the benefits of Participatory IP4T beside for the PTSL.*

*This writing delivered the results of the Participatory IP4T activity in order to support the PTSL in the Madiun Regency. The research results showed that the Regional Leadership Coordination Forum (FORKOPIMDA) of Madiun Regency, the Village Government, the Office Land, and the Society, supported the existence of the Participatory IP4T. The stages of Participatory IP4T consist of four stages namely: (1) Planning Stage, (2) Preparation, (3) Implementation, and (4) Supervision, Monitoring and Evaluation. The land plot data collecting of Participatory IP4T is done by three village's pillars in the way of door-to-door. The Participatory IP4T in the Madiun Regency is a strategy applied as an effort to obtain the plot-based P4T data. The results of the Participatory IP4T activity was in the form of Work Map which can be useful as the work map for the PTSL activity. Meanwhile the results of the textual and juridical data collecting, which was collected in the format of Microsoft Excel, can be utilized for the initial data of the PTSL data, therefore the PTSL Team can save time and energy. In other words, the PTSL in the Madiun Regency was supported by the existence of the Participatory IP4T activity.*

**Keywords:** *Participatory IP4T, APBN, PTSL.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai fungsi penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia. Demi terdaptarnya seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan program strategis berupa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL merupakan solusi pendaftaran tanah yang lebih efektif dan efisien, sekaligus sebagai sarana peningkatan kualitas data pendaftaran yang ada di Indonesia. PTSL mulai bergulir sejak disahkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tujuan dari program ini adalah mempercepat pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan ekonomi rakyat (konsideran bagian menimbang Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 35 Tahun 2016).

Rahardi menyatakan bahwa target pensertipikatan tanah PTSL di Kabupaten Madiun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun pada tahun 2018 mendapatkan target awal PTSL sebesar 64.000 bidang. Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun mendapatkan peningkatan target Per 31 Oktober 2018, yaitu target Peta Bidang Tanah (PBT) sebesar 102.540 bidang, dan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebesar 74.000 bidang. Target tersebut jauh berbeda dengan tahun 2016 yang hanya 5.000 bidang dan tahun 2017 sebesar 20.500 bidang (Komunikasi Pribadi, 25 Februari 2019).

Target PTSL dan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang berjalan bersamaan membuat Kantor Pertanahan kewalahan. Kegiatan IP4T yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sering terkendala oleh sumberdaya manusia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas. Bila menunggu dari APBN maka dibutuhkan waktu yang lama untuk mewujudkan setiap desa/kelurahan di kabupaten/kota melaksanakan IP4T. Sementara itu banyak kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan selain IP4T, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Kegiatan Pertanahan lainnya. Solusi untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya manusia dan APBN yang terbatas dalam pelaksanaan IP4T, maka perlu dilakukannya kegiatan berbasis partisipasi masyarakat. Kegiatan berbasis partisipasi masyarakat, yang dalam konteks IP4T disebut IP4T Partisipatif.

IP4T Partisipatif yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun merupakan wujud partisipasi masyarakat, dengan terselenggaranya IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun maka Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun ditetapkan sebagai *pilot project* IP4T Partisipatif. IP4T Partisipatif yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun melibatkan instansi lain, perangkat desa dan masyarakat dalam mengidentifikasi bidang tanah terkait informasi pertanahan seperti penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah hingga potensi sengketa tanah. Elemen atau unsur yang terlibat dalam kegiatan IP4T Partisipatif adalah pihak desa/kelurahan, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), serta unsur Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah Kabupaten Madiun. IP4T Partisipatif tersebut kemudian dijadikan salah satu strategi yang diterapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun untuk percepatan PTSL guna mendukung program Presiden Joko Widodo yang menargetkan seluruh tanah di Indonesia harus bersertipikat di tahun 2025.

## **B. Perumusan Masalah**

Fakta yang terjadi di Indonesia selama 73 tahun merdeka, belum ada kabupaten/kota yang mempunyai peta bidang (kadaster) lengkap yang digunakan secara bersama oleh pemangku administrasi pertanahan. Apabila pada tahun 2019 ini setiap desa/kelurahan di kabupaten/kota melaksanakan IP4T secara bersama-sama, maka dapat mempercepat terwujudnya Indonesia mempunyai peta bidang (kadaster) lengkap. Bila menunggu dari APBN maka dibutuhkan waktu yang lama sehingga untuk mewujudkan setiap kabupaten/kota di Indonesia mempunyai peta bidang (kadaster) lengkap, maka perlu dilakukan kegiatan berbasis Partisipatif masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting bagi Kantor Pertanahan ketika sumberdaya manusia di Kantor Pertanahan terbatas. Target PTSL yang sedemikian besar tidak boleh dihalangi dengan keterbatasan sumberdaya manusia dan anggaran yang minim di Kementerian ATR/BPN, sehingga perlu adanya partisipasi masyarakat dan keterlibatan *stakeholders* dalam kegiatan pertanahan, termasuk dalam kegiatan IP4T. Kabupaten Madiun melakukan kegiatan IP4T dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan IP4T Partisipatif, selanjutnya hasil kegiatan kegiatan IP4T Partisipatif tersebut dapat membuka peluang untuk mendukung mendukung program Presiden Joko Widodo melalui kegiatan PTSL.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilaksanakan yaitu :

- a. Untuk mengetahui tahapan kegiatan IP4T Partisipatif yang melibatkan para pihak;
- b. Untuk mengetahui manfaat dari hasil IP4T Partisipatif untuk kegiatan PTSL.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian mencakup 3 hal, yaitu :

### **a. Manfaat ilmiah/akademis**

- 1) Secara akademik dapat menambah khazanah keilmuan tentang proses IP4T partisipatif dan PTSL;
- 2) Sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti lain untuk penelitian dalam bidang IP4T partisipatif dan PTSL.

### **b. Manfaat Sosial**

- 1) Bagi Pemerintah Desa, adalah terbentuknya pengetahuan dan keterampilan aparat desa, pemilik tanah dan muda-mudi desa mengenai pentingnya pembuatan peta berbasis bidang tanah serta untuk membangun basis data pertanahan yang lengkap;
- 2) Bagi Kantor Pertanahan, dapat dijadikan sebagai dasar dalam mensukseskan program PTSL.

### **c. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan kontribusi bagi Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan cita-cita percepatan PTSL.



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Forkopimda Kabupaten Madiun, Pemerintah Desa, Kantor Pertanahan dan Masyarakat mendukung adanya IP4T Partisipatif, sehingga IP4T Partisipatif dapat mendukung adanya pelaksanaan PTSL. Tahapan IP4T Partisipatif terdiri dari tahapan Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, dan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi. Pengumpulan data bidang tanah IP4T Partisipatif dilakukan oleh 3 pilar desa secara *door to door*.
2. IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun merupakan salah satu strategi yang diterapkan sebagai upaya memperoleh data P4T yang berbasis bidang. Hasil kegiatan IP4T Partisipatif berupa Peta Kerja yang dapat berguna sebagai peta kerja kegiatan PTSL, sedangkan hasil pengumpulan data yuridis dan tekstual yang ditabulasi dalam format excel dapat dimanfaatkan untuk data awal data PTSL, sehingga Tim PTSL dapat menghemat waktu, dan tenaga. Dengan kata lain PTSL di Kabupaten Madiun didukung oleh adanya kegiatan IP4T Partisipatif.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu membangun Aplikasi dan Sistem Informasi IP4T Partisipatif untuk mempercepat pelaksanaan IP4T Partisipatif, apabila IP4T Partisipatif akan dilaksanakan di seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
2. Keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia di Kementerian ATR/BPN dapat teratasi dengan kebijakan alternatif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan *stakeholders*. Oleh karenanya perlu dilaksanakan IP4T Partisipatif di seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Indonesia sebab hasil dari kegiatan P4T Partisipatif dapat berguna untuk pelaksanaan PTSL.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal, dan Skripsi

- Aisiyah, N dkk 2015, 'Pemetaan Partisipatoris (Studi Kasus Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan)', *Prosiding FIT ISI 2015*.
- Astuti, NOC 2018, 'Pemetaan Partisipatif Berbasis Komunitas dalam Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah di Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Azwar, S 2004, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Dyatmiko, DB 2015, 'Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Dalam Menunjang Percepatan Pensertipikatan Tanah (Studi Evaluatif di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi)', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif 2014, *Standard Operating Procedures Penyelenggaraan Pemetaan Partisipatif dan Pengendalian Kualitas Peta Partisipatif*, JKPP: Bogor.
- Kariyono 2018, 'Pemanfaatan Peta Tematik Bidang Tanah (PTBT) Hasil Pemetaan Partisipatif untuk Mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)', *Prosiding FIT ISI 2015*, hlm. 147.
- Mujiati 2015, 'Peta P4T Hasil Pemetaan Partisipatif sebagai Instrumen Identifikasi Tanah *Absentee*', *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, edisi i, no. 1, hlm. 59-68.
- Sugiyono 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta: Bandung.
- Wiadi, dkk 2010, 'Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Kabupaten Jembrana Berbasis Web', *Lontar Komputer*, Vol. 1, No. 1.
- Wardani, AEP 2018, '*Participatory Land Registration (PaLaR)* dalam percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Bali', *Seminar Nasional Geomatika 2018*.

### Peraturan Perundang-undangan

- TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tahun 2018.
- Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif Tahun 2018.